



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional didasari pada prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini mengacu pada meningkatnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan anggaran daerah tersebut. Mulai dari kepala daerah hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dibawahnya. Ini dapat diartikan sebagai meningkatnya partisipasi pegawai dari tingkatan bawah dalam proses penyusunan anggaran (Efrizar, 2017).

Menurut Mardiasmo (2009) penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga telah melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik ke pemerintah yang desentralik partisipatoris. Sebagai salah satu organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang memiliki orientasi kepada kepentingan masyarakat serta mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya.

Pemerintah daerah adalah suatu lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dimana sumber kepercayaanya berasal dari masyarakat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kepercayaan yang diberikan masyarakat pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebagai salah satu bagian dari organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penilaian dari kinerja ini menjadi sorotan dari berbagai pihak dan terlebih lagi adanya otonomi daerah yang akan memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur urusan yang ada didaerahnya.

Keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki ciri khas sebagai wilayah pasang surut dan bergambut. Menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju dan terbuka adalah merupakan bukti bahwa diwilayah lahan margin telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjadikan bagi masa depan daerah dan masyarakat yang setara dengan daerah-daerah lainnya yang bersifat lahan wilayahnya jauh lebih berpotensi.

Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin dari pada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat dan semakin meratanya distribusi pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya (www.riau.go.id).

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Kinerja manajerial merupakan suatu kegiatan individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial seperti perencanaan, investigasi, koordinasi,



evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan (Mahoney et al 1963) dalam (Nugraha, 2015). Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial yaitu salah satunya partisipasi dalam penyusunan anggaran.

Penyusunan anggaran terakuntabilitas dapat tercapai apabila seluruh SKPD ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Dengan berpartisipasinya seluruh SKPD dalam penyusunan anggaran diharapkan produktivitas kerja dapat meningkat, dengan demikian keuangan daerah dapat dikelola dengan baik dan semaksimal mungkin salah satu hal yang memiliki pengaruh terhadap kualitas proses pengukuran kinerja adalah kualitas proses penganggaran karena pengukuran kinerja adalah mata rantai yang berkesinambungan dengan proses penganggaran. Dalam akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan anggaran memiliki peran yang sangat penting, estimasi pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang terkandung dalam anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor publik.

Adapun fenomena yang terjadi saat ini, berdasarkan pemantauan dari bupati Indragiri Hilir. M Wardan melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya instansi pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat. Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat kehadiran pegawai cukup baik, setelah melakukan pemantauan kehadiran para pegawai, pelayanan dan aktivitas pelayanan publik yang ada di Indragiri Hilir (www.mediacenter.riau.go.id).

Akuntabilitas oleh pemerintah daerah sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Mardiasmo, 2009).

Pada dasarnya akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawabkan atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran (Mardiasmo, 2009).

Menurut Mardiasmo (2009) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, anggaran digunakan sebagai pedoman kerja sehingga proses penyusunan harus memerlukan organisasi anggaran yang baik, pendekatan yang tepat serta model-model perhitungan jajaran dalam manajemen dalam suatu organisasi. Kejelasan sasaran anggaran sangat membantu untuk mencapai kinerja manajerial yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja yang diharapkan dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kualitas pengukuran kinerja sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pengukuran penganggaran karena pengukuran kinerja merupakan mata rantai



yang berkesinambungan dengan proses penganggaran. Karakteristik penganggaran salah satunya adalah kejelasan sasaran anggaran yang merupakan sejauh mana tujuan anggaran yang ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut (Solina, 2014).

Ketidak jelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Tujuan dan sasaran yang jelas dalam organisasi menunjukkan menunjukkan fungsi utama manajemen yang dapat membantu meningkatkan kinerja (Anderson, 2015). Anggaran harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian didalam kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus menggambarkan sasaran kinerja secara jelas dan spesifik.

Setiap Organisasi sektor publik tentunya memiliki sistem pelaporan yang baik karena agar dapat memantau kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan kegiatan atau program dan kebijaksanaan sesuai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan visi dan misi organisasi. Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Yulianti, dkk, 2014).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2015) Pengaruh Kejelasan Sasaran anggaran, Desentralisasi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Menunjukkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial sementara desentralisasi dan akuntabilitas publik tidak dapat membuktikan penerapan yang baik terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Persoalan yang muncul dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu adalah rendahnya realisasi program atau kegiatan dan lemahnya pencapaian anggaran yang tidak mencapai target sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tingginya SILPA ini menggambarkan kinerja SKPD di lingkungan pemerintahan Indragiri Hulu masih lemah penyebabnya dari lemahnya serapan anggaran ini adalah tidak berjalannya dengan efektif program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

Efrizar (2017) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial. Menunjukkan hasil bahwa pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pelaporan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Rokan Hulu dituntut mempunyai kinerja berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dengan adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut dalam mengkoordinasi Aparatur pemerintah daerah seperti Sekretariat Daerah, SKPD dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat untuk lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

berorientasi pada kepentingan publik, pemerintah harus berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas kepada masyarakat yang berkesinambungan.

Darmawan (2016) Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Di SKPD Kabupaten Bengkalis. Menunjukan hasil bahwa akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Persoalan yang muncul dalam kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Bengkalis adalah rendahnya realisasi program atau kegiatan dan lemahnya serapan anggaran sehingga menyebabkan tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD 2011-2013 yang masing-masingnya mencapai 30 persen. SILPA tertinggi terjadi tahun 2011 yang mencapai 37 persen. Hal ini membuktikan bahwa APBD setiap tahun tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Efrizar (2017) yang berjudul “ Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu) ”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya yaitu, penelitian terdahulu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir karena kinerja manajerial pemerintah daerah perlu di tingkatkan pengaruhnya terhadap akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan dimana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

kinerja yang baik akan mampu memberikan kualitas yang baik terhadap peningkatan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DI SKPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir ?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir ?
4. Apakah akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh sistem pelaporan terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara simultan terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Akuntabilitas publik bermanfaat mampu membatasi ruang gerak terjadinya perubahan dan pengulangan dan revisi perencanaan.
2. Kejelasan sasaran anggaran bermanfaat untuk mempermudah pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya
3. Sistem pelaporan bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.
4. Kinerja manajerial bermanfaat untuk mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui permotivasi karyawan secara maksimum.

Manfaat Praktis

1. Bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
Peneliti ini diharapkan dapat membantu dan berguna dalam memecahkan masalah-masalah akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan yang baik dalam perusahaan khususnya perbaikan secara keseluruhan sehingga mempengaruhi kinerja manajerial.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan secara langsung mengenai pengaruh akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan terhadap kinerja manajerial.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak lain untuk menambah pengetahuan, sumbangan pikiran atau digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang memuat tentang urutan dalam penulisan proposal, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan tentang Telaah Teoritis, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, serta Hipotesis.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Metode Penelitian dan Analisa Data yang meliputi Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan di akhiri dengan Analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara rinci mengenai gambaran umum obyek penelitian, analisis, dan hasilnya serta pembahasan hasil penelitian sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan dan saran yang ditunjukkan kepada berbagai pihak yang akan melakukan penelitian yang serupa. Bab ini juga berupa keterbatasan atau masalah yang dihadapi selama penelitian.